Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2623-1611*
Volume 6 Nomor 1 April 2021 *e-ISSN 2623-1980*

INTERNALISAI MATERI AJAR MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN LAHAN BASAH

Fatimah* dan Reja Fahlevi
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lambung Mangkurat
*Corresponding author: fatimah@ulm.ac.id

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaran di berbagai perguruan tinggi di Indonesia hanya bersifat hapalan. Tidak ada nilai-nilai dan pelajaran yang bisa diambil dan dirasakan ketika mengikuti perkuliahan ini. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai mata kuliah *"role model*" untuk permasalahan-permasalahan bangsa dan negara, seperti permasalahan pendidikan anti korupsi. penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian desain. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi dan triangulasi. Penelitian ini menghasilkan materi Ajar Pendidikan yang tidak hanya menitikberatkan kepada pengetahuan semata, melainkan juga membekali mahasiswa keterampilan-keterampilan seperti menganalisis dan berfikir kritis sehingga akan membentuk keterampilan-keterampilan yang lain.

Kata kunci: desain, materi ajar, PKn, anti korupsi, lahan basah

1. PENDAHULUAN

Perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakkan hukum (law enforcement) semata, tetapi harus dihadapi dengan semangat dan atmosfer antikorupsi melalui pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanamkan pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui Perguruan Tinggi, karena perguruan tinggi adalah sebuah proses pembudayaan. Sekaligus sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Caranya, perguruan tinggi memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi. (Montessori, Maria, 2012).

Pendidikan Antikorupsi (PAK) selain bisa berdiri sendiri sebagai mata kuliah, PAK juga dapat diintegrasikan dalam berbagai mata kuliah yang sudah ada sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku mahasiswa. Untuk maksud tersebut dukungan kultur dan iklim perguruan tinggi sangat dibutuhkan terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang dapat mengintegrasikan PAK adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT).1 Dalam UU No 20 Tahun 2003 mengatur bahwa Pendidikan Kewarganegaran merupakan salah satu program pendidikan atau materi yang wajib dimuat dalam kurikulum di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Tidak terkecuali di Perguruan Tinggi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib ada dan diajarkan di setiap Universitas, Fakultas ,maupun Program Studi di Indonesia. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan pada tahun pertama perkuliahan, hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan awal dan menanamkan sikap anti korupsi pada mahasiswa sejak dini.

Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (PKn) dirasa tepat untuk matakuliah yang di dalamnya diintegrasikan materi-materi ajar seputar pendidikan anti korupsi, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib disemua perguruan tinggi di Indonesia , mata kuliah ini tidak hanya serta merta diajarkan di Fakultas Hukum saja,melainkan wajib bagi semua fakultas untuk mengajarkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sehingga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan matakuliah strategis dalam hal melakukan dan menciptakan dan mengkader mahasiswa anti korupsi yang terampil, berpengalaman dan berkarakter.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Tetapi yang terjadi selama ini mata kuliah pendidikan kewarganegaran di berbagai perguruan tinggi di Indonesia hanya bersifat hapalan tidak lebih hanya seperti "transfer of knowledge" saja, tidak ada nilai-nilai dan pelajaran yang bisa diambil dan dirasakan ketika mengikuti perkuliahan, dan jarang sekali mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai mata kuliah "role model" untuk permasalahan-permasalahan bangsa dan negara, seperti permasalahan pendidikan anti korupsi. (Danial, Endang & Harmanto, 2015).

Untuk itu perlu kiranya mendesain Model materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pendidikan Anti Korupsi yang tidak hanya belajar dikelas namun juga melakukan kegiatan pendukung seperti analisis putusan, kampanye, atau penyampaian di depan publik bermanfaat memberikan experential learning. Dengan tujuan utama untuk membentuk dan mengkaderisasi mahasiswa antikorupsi yang terampil, berpengalaman dan berkarakter. Hal ini sudah seyogyagnya harus dilakukan segera karena tingkat urgen yang tinggi, karena melihat banyak fenomena-fenomena kasus korupsi yang kian hari kian ramai seolah-olah tidak ada kata berhenti diperbincangkan dan menjadi hal biasa saja padahal tindak pidana korupsi adalah tindak pidana extraordinary crime. Dengan materi-materi ajar seperti itu diharapkan mahasiswa bisa memperoleh pengetahuan, pelatihan mengenai kegiatan- kegiatan antikorupsi yang mana akan berpengaruh terhadap sikap mahasiswa untuk menjadi generasi antikorupsi yang terampil, berpengalaman serta berkarakter.

Secara umum tujuan pendidikan anti-korupsi adalah : (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketigaranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom yaitu : pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa. (Aspin, David N & Chapman, Judith D, 2007).

2. METODE

Dalam Penelitan ini yang digunakan adalah metode penelitian desain. Penelitan Desain merupakan suatu studi penelitian yang meliputi proses perancangan yang sistematis. Artinya, sama dengan studi lain, penelitian ini memiliki kaidah tertentu yang harus dirancang dan direncanakan dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti mencoba merencang (Mendesain) bahan ajar mata Kuliah PPKn di Peguruan Tinggi berbasis Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan lahan basah . Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Peneliti dan kawan-kawan yang tergabung di dalam pusat kajian anti korupsi dan good governance Uninversitas Lambung Mangkurat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan analisis dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi ajar untuk mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan berbasis Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Lahan Basah dimulai dengan materi Fakta, dimana mahasiswa diminta untuk mencari dan menyebutkan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di lingkungan lahan basah, setelah mahasiswa mendapatkan kasus-kasus tindak Korupsi kemudian dosen terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian Korupsi di lahan basah, Jenis-Jenis Korupsi dilahan basah , Klasifikasi tindak Korupsi dan lain sebagainya yang mana semua merupakan materi Konsep. Kemudian setelah mahasiswa mengerti mengenai materi Konsep, Dosen menyuruh mahasiswa untuk mengamati dan menganalisis kasus-kasus yang sudah disebutkan oleh mahasiswa di awal, mahasiswa disuruh mencari data-data mengenai kasus tersebut dari awal kasus sampai dengan putusan pengadilan, mahasiswa dibebaskan untuk mencari data-data tersebut dari berbagai sumber di internet, literature maupun narasumber yang relevan dengan kasus tindak korupsi itu merupakan bagian dari materi Prinsip. Kemudian setelah data-data terkumpul mahasiswa menuliskan hasil analisisnya dan pengamatanya yang diperoleh dari berbagai sumber mahasiswa disuruh untuk membuat skema alur berfikir dari hasil pengamatanya dan analisisnya sehingga menghasilakan sebuah solusi dan pencegahan untuk tindak pidana korupsi ini yang disebut sebagai materi Prosedur. Kemudian hasil analisis dan hasil rekomendasi berupa solusi pencegahan akan ditampilkan dan presentasikan di depan kelas secara bergantian.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Dengan materi ajar seperti itu maka harapanya akan terbentuk mahasiswa anti korupsi yang terampil menangani dalam memberantas korupsi, berpengalaman dalam mencegah dan mengatas korupsi serta berkarakter antipasti terhadap korupsi ini materi sikap.

Adapun untuk mempermudah kalimat di atas, maka peneliti akan menjabarkan materi-materi mata kuliah Pendidika Kewarganegaraan berbasis Pendidikan Anti Korupsi tersebut dalam bentuk tabel:

Jenis Materi Pelajaran	Tuntutan Perkuliahan
Fakta	• Menyebutkan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di lingkungan lahan basah. • Menyebutkan kasus korupsi yang paling sering terjadi di lingkungan lahan basah • Menyebutkan kasus-kasus korupsi yang belum terselesiakan dilingkungan lahan basah hingga hari ini • Menyebutkan sektor-sektor di pemerintahan yang rawan terkena virus korupsi • Menyebutkan regulasi atau peraturan perundagan-undangan terkait dengan korupsi di lingkungan lahan basah
Konsep	• Mendefiniskan pengertian Korupsi dan ciri-ciri korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang terjadi di lingkungan lahan basah • Mendefiniskan pengertian Anti Korupsi, dan Pendidikan Anti Korupsi • Mengklasifikasikan jenis-jenis Tindakan korupsi di lingkungan lagan basah • Mengklasifikasikan nilai-nilai Ankti Korupsi • Mengidentifikasi tindak pidana korupsi besar yang pernah terjadi di lingkungan lahan basah
Prinsip	• Menganalisis beberapa kasus korupsi yang terjadi dilingkungan lahan basah dari penyebab korupsi sampai dengan putusan pengadilan • Menganalisis peran Pendidikan dan Perguruan Tinggi dalam upaya untuk mencegah dan memberantas Korupsi di lingkungan lahan basah • Menganalisis kelebihan dan Kelemahan penegak hukum dan Lembaga-Lembaga pemerintah lainya dalam upaya untuk mencegah dan memberantas Korupsi di lingkungan Lahan Basah. • Menganalisis regulasi atau peraturan perundang-undagan yang terkait dengan korupsi di lingkungan lahan basah
Prosedur	• Menguraikan dan memberikan solusi atas beberapa kasus korupsi di lingkungan lahan basah dari penyebab korupsi sampai dengan putusan pengadilan • Menguraikan dan memberikan solusi mengenai peran Pendidikan dan Perguruan Tinggi dalam upaya untuk mencegah dan memberantas Korupsi di lingkungan lahan basah. • Menguraikan dan memberikan solusi kelebihan dan Kelemahan penegak hukum dan Lembaga- Lembaga pemerintah lainya dalam upaya untuk mencegah dan memberantas Korupsi di Lingkungan lahan basah . • menguraikan dan memberikan solusi atas kelemahan regulasi atau peraturan perundang-undagan yang terkait dengan korupsi di Lingkungan lahan Basah
Sikap atau Nilai	• Menunjukan sikap benci terhadap korupsi • Komitmen untuk memerangi korupsi

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

	• Mengilustarikan jika disekitar mereka ada pelaku korupsi, maka apa yang akan mereka lakukan, • Mengedepankan sikap anti korupsi

Dengan penyusunan bahan ajar seperti di atas, ada 3 komponen yang menjadi sasaran dari penyusunan bahan (materi) ajar ini, diantaranya:

a) Pengetahuan tentang korupsi di lingkungan Lahan Basah

Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, mahasiswa perlu mendapatkan berbagai informasi yang, terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu pembahasan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada mahasiswa.

Disamping itu mahasiswa juga memiliki argumen yang jelas mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan harus dihindari. Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas akan memberi mahasiswa wawasan tentang korupsi yang lebih luas. Pada akhirnya berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inpirasi bagi mahasiswa tentang banyak cara yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Kesemua ini merupakan modal dasar dalam penanaman atau pembentukan sikap dan karakter anti korupsi. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tersebut diharapkan mahasiswa mampu untuk menilai adanya perilaku korup dalam masyarakat atau institusi disekitarnya. Karena itu pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada mahasiswa, melainkan informasi itu diperlukan agar mahasiswa mampu membuat pertimbangan pertimbangan tertentu dalam menilai.

b) Pengembangan Sikap Antikorupsi di Lingkungan Lahan Basah

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap mahasiswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut. Kesemua elemen diatas saling berhubungan dan saling bertukar tempat misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja melainkan juga mengandung hal lainnya .

Berdasarkan tahap-tahap perkembangam moral siswa dan penerimaannya atas konvensi, maka pendidikan antikorupsi, sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kematangan perkembangan moral yang dimiliki siswa. Siswa sekolah menegah atas yang telah berusia antara 14 sampai dengan 19 tahun dapat diberi penjelasan bahwa standar perilaku antikorupsi adalah wajib bagi setiap orang dalam posisi apapun untuk mempertahankan sistem sosial yang ada. Satu hal yang paling penting adalah korupsi itu dinilai jahat dilihat dari perspektif moral dan konvensi.

Apapun juga nilai yang ingin dimasukan dalam pendidikan, maka pendidikan menyangkut moral adalah hal yang utama, karena itu merupakan bagian dari kewajiban untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia yang menghendaki perilaku lebih baik dari yang pernah ada. Oleh karena itu pendidikan yang memperkuat moralitas peserta didik haruslah ditangani oleh institusi pendidikan secara serius. (Komalasari, 2013).

c) Kreativitas dan Keterampilan

Pendidikan anti korupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak begitu membedakan secara tegas antara dua regulasi sosial yaitu moralitas dan konvensi. Dalam perspektif moral, perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konfensi. (Slavin, 1994).

4. SIMPULAN

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pendidikan Anti Korupsi perlu diimplementikan di semua Universitas di seluruh Indonesia, materi ajar seperti ini adalah tidak hanya menitikberatkan kepada pengetahuan (knowledge) semata, melainkan juga membekali mahasiswa keterampilan-keterampilan seperti menganalisis dan berfikir kritis (analytical & critical thinking) sehingga akan membentuk keterampilan-keterampilan experential learning yang lain. Maka dari itu sangat penting sekali materi ajar Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Lahan Basah ini benar-benar di Implementasikan ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aspin, David, N., & Chapman, Judith D. (2007). *Values Education and Lifelong Learning*. Springer : Netherland.

Danial, Endang & Harmanto. Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Volume 19 Nomor 3, Oktober.

Komalasari, Kokom. (2013). *Pembelajaran Konstektual Konsep & Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.

Montessori, Maria. (2012). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Volume 19, Nomor 2, Oktober 2012.

Modern Didactic Center. (2006). *Anti Corruption Education At School*. Garnelish Publishing : Vilnius. Lithuania.

Slavin, Robert E. (1994). *Educational Psychology: Theory and Practice.* Allyn and Bacon : Boston. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.